

## **Bab V**

### **Penutup**

#### **5.1. Kesimpulan**

Setelah melakukan rangkaian penelitian yang mengacu kepada kaidah-kaidah ilmiah penelitian kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan hasil dari penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Program Rumah Bersubsidi. Peneliti akan menyimpulkan masing-masing indikator dari landasan teori dalam peneliti ini yaitu teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni:

##### **1. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan**

Yang menjadi tujuan dari program rumah subsidi yaitu memberikan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa memiliki hunian pribadi yang layak huni. Hal ini selaras dengan *Road Map* Pengarusutamaan Gender Kementerian PUPR 2020-2024 yaitu pembangunan yang bisa dinikmati oleh kelompok rentan. Kementerian PUPR berkomitmen untuk bisa menyediakan rumah yang bisa dijangkau oleh masyarakat rentan dengan memberikan bantuan pembiayaan kepada mereka yang lemah secara ekonomi. Bantuan pembiayaan akan disalurkan oleh Bank Pelaksana yang telah bekerjasama dengan Kementerian PUPR.

##### **2. Sumber Daya**

Pembiayaan program KPR bersubsidi berasal dari APBN dan juga skema KPBU. Persentase sumber pembiayaan KPR subsidi yaitu 30 persen APBN dan 70 persen badan usaha swasta. Di tahun 2022, anggaran untuk pembiayaan rumah subsidi mencapai Rp 28,7 triliun yang digunakan untuk membiayai FLPP, SBUM, BP2BT serta akad kredit di tahun sebelumnya. Dalam penyusunan anggaran di Keementarian PUPR, mereka menggunakan alat analisis gender berupa *Gender*

*Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)* agar sesuai dengan kebutuhan gender terhadap rumah yang layak huni.

### **1. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan**

Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam bentuk rapat rutin yang dilaksanakan dengan unit organisasinya atau pihak terkait lainnya. Kendala dalam pelaksanaan program KPR subsidi dari sisi kemanfaatannya, kualitas bangunan, dan penerimanya. Kendala tersebut seringkali terjadi dalam tahap monitoring dan evaluasi.

### **2. Karakteristik Badan-badan Pelaksana**

Kesimpulan dari indikator ini ialah pembentukan unit organisasi untuk keberhasilan program KPR bersubsidi berjalan dengan baik. Kementerian PUPR memiliki struktur organisasi yang telah kuat. Secara struktural, penyaluran FLPP dilaksanakan oleh BP Tapera dan pengawasan dilakukan oleh Direktur Pelaksana Pembiayaan Perumahan. Sehingga, struktur organisasi yang menjadi faktor pendukung keberhasilan program sudah diciptakan sesuai dengan kebutuhan.

### **3. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi**

Agar program ini bisa mencapai tujuannya, maka lingkungan dari program ini harus dalam kondisi yang mendukung. Kondisi ekonomi dan politik paling berpengaruh terhadap indikator ini terhadap keberhasilan program. Kondisi perekonomian harus dalam kondisi yang positif yaitu bisa tumbuh secara positif serta kondisi politik harus dalam kondisi yang stabil agar menghasilkan keputusan politik yang berpihak pada keberhasilan program.

### **4. Masalah Kapasitas**

Peneliti berkesimpulan di indikator terakhir ini bahwa secara keseluruhan Kementerian PUPR telah berhasil menjalankan program KPR bersubsidi. Program ini sudah menjadi jawaban dari kebutuhan praktis gender terhadap kepemilikan rumah baik itu susun atau tapak yang layak huni serta bisa didapatkan dengan

harga terjangkau melalui bantuan pembiayaan yang disediakan oleh Kementerian PUPR lewat Bank Pelaksana. Program ini tidak dibatasi pada gender tertentu, baik laki-laki maupun perempuan bisa memperoleh bantuan pembiayaan apabila memenuhi persyaratan dan dikategorikan mampu mengangsur oleh Bank Pelaksana.

Berdasarkan kesimpulan dari tiap indikator tersebut, maka kesimpulan umum dalam penelitian ialah pelaksanaan program rumah subsidi sudah berjalan dengan baik namun masih ada kekurangan di dalamnya. Kendala tersebut berasal pemerintah dan masyarakat. Realiasi yang tidak mencapai target menjadi kendala utama dalam program ini sehingga nilai kemanfaatan program terhambat untuk bisa sampai ke tangan kelompok sasaran. Internalisasi pengarusutamaan gender dalam program ini bisa terlihat dari insentif yang diberikan, penggunaan alat analisis gender, dan mengacu pada *Road Map* Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan program.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti dapatkan dari hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran mengenai Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Program Rumah Subsidi Kementerian PUPR. Sarana tersebut di antaranya:

### **A. Sasaran Praktis**

1. Pengawasan terhadap jalannya program ini harus lebih diperketat sebab dalam tahap pembangunan hingga penerima manfaat (*beneficiaries*) terkadang terjadi ketidaksesuaian dengan perencanaan. Seperti spesifikasi bangunan dan masyarakat calon penerima bantuan pembiayaan ternyata sudah tidak lagi dikategorikan sebagai MBR karena mengalami peningkatan penghasilan.
2. Direktur Pelaksana Pembiayaan Perumahan hendaknya bisa lebih cepan dalam menerbitkan Surat Pernyataan Persetujuan Pemberian

Kredit (SP3K) kepada debitur dengan melengkapi PSU di rumah subsidi yang akan diberikan kepada MBR.

3. Karena dalam beberapa skema KPBU yang bertujuan untuk menutupi *funding gap* mengalami kesulitan dalam mencari investor, maka pemerintah mesti menyediakan berbagai kebutuhan untuk bisa menggaet investor. Kebanyakan investor berfokus pada penyediaan lahan yang telah disediakan oleh pemerintah.
4. Masyarakat rentan yang dijadikan sebagai kelompok sasaran (*beneficiaries*) hendaknya bisa memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Bank Pelaksana dan bisa mengumpulkannya tepat waktu agar proses penyaluran bantuan pembiayaan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR bisa berjalan dengan lancar.

#### **B. Saran Teoritis**

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk bisa menggali lebih dalam lagi mengenai referensi-referensi laporan dan dokumen mengenai implementasi kebijakan pengarusutamaan gender khususnya dalam program KPR subsidi yang sudah diterbitkan oleh Kementerian PUPR di internet.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk bisa melakukan penelitian lebih mendalam lagi dengan mewawancarai pejabat struktural di Sekretariat PUG Kementerian PUPR untuk mendapatkan informasi pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan program rumah subsidi.
3. Hasil penelitian ini berfokus pada pelaksanaan rumah subsidi yang dikorelasikan dengan beberapa bagian dalam *Road Map* Pengarusutamaan Gender Kementerian PUPR 2020-2024. Sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk bisa menggali lebih dalam tentang alat analisis gender yang digunakan dalam program ini, mulai dari tahap penyusunan program, penganggaran, dan pelaksanaan.